

**IMPLEMENTASI DIGITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA
UTARA (STUDI KASUS BUMDes BULUH DURI MANDIRI)**

Rocky Marsiano Purba
NPP. 28.0146

*Asdaf Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: marspurba@gmail.com

ABSTRACT

In this study the author took the title "Implementation of Digitalization of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Serdang Bedagai Regency, North Sumatra Province (Case Study of BUMDes Buluh Duri Mandiri". This study aims to determine the implementation of digitalization of Village Owned Enterprises, know the supporting factors and inhibitions during implementation, and efforts to overcome these obstacles. The method used by the author is descriptive qualitative. Data collection techniques used by the author are observation, interview, documentation. As for analyzing the data, the authors used data reduction techniques, data exposure, and conclusion drawing. The results obtained by the author after conducting research on internship activities is the digitization of Village Owned Enterprises has been applied but still encouraged and encouraged by the appointment of role models by the Community and Village Empowerment Office. Bumdes Buluh Duri Mandiri one of the role models appointed by the district managed to implement digitization well as evidenced by the contribution to PAD increased despite the current pandemic conditions. The obstacles experienced by the Community Empowerment Office and Serdang Bedagai Regency Village are limited knowledge in the use of technology, different educational backgrounds of administrators, the existence of network blank points, there are some wrong mindsets related to bumdes, and limited budgets. As an effort made by the Office of Community and Village Empowerment to overcome the obstacles of the implementation of digitalization BUMDes is to develop a marketplace hopeshop.id, conduct periodic checks and monitoring, give reprimands to warning letters, bridge bumdes management with technology activists and academics.

Keywords: Digitalization, Village Owned Enterprises, Villages

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Implementasi Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus BUMDes Buluh Duri Mandiri)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi digitalisasi Badan Usaha Milik Desa, mengetahui faktor pendukung dan penghambat saat implementasi, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh penulis setelah melakukan penelitian pada kegiatan magang adalah digitalisasi Badan Usaha Milik Desa sudah diterapkan namun masih himbuan dan dorongan dengan penunjukan role model oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bumdes Buluh Duri Mandiri salah satu role model yang ditunjuk oleh pihak kabupaten berhasil menerapkan digitalisasi dengan baik dibuktikan dengan sumbangan terhadap PAD meningkat meskipun kondisi pandemi sekarang. Hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai adalah pengetahuan terbatas dalam pemanfaatan teknologi, latar belakang pendidikan pengurus yang berbeda, adanya titik-titik *blank* jaringan, terdapat beberapa *mindset* yang keliru terkait bumdes, dan terbatasnya anggaran. Sebagai upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengatasi hambatan implementasi digitalisasi BUMDes adalah dengan mengembangkan *marketplace hopeshop.id*, melakukan pengecekan dan monitoring berkala, memberikan teguran hingga surat peringatan, menjembatani pengurus BUMDes dengan pegiat-pegiat teknologi dan akademisi.

Kata Kunci: Digitalisasi, Badan Usaha Milik Desa, Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah unit terkecil dari pemerintahan yang menjadi wadah pertama dalam menampung keluhan masyarakat yang beragam. Membangun Indonesia dengan menguatkan wilayah pinggiran yang dalam hal ini termasuk desa adalah salah satu program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia sehingga implementasi dari hak tersebut diambil Tindakan dengan membentuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lembaga Setingkat Menteri yang spesifik membidangi desa, hingga menggelontorkan dana desa dalam rangka mendukung perekonomian desa, sehingga besar harapan desa yang mandiri dan sejahtera dapat terwujud.

pembangunan desa acapkali tertinggal dibanding dengan perkotaan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang dinilai lambat, sehingga perlu peningkatan perekonomian penduduk desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong perekonomian masyarakat desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2013:1). Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah dengan memberikan wewenang pada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi tingkat desa, salah satunya adalah dengan mengelola Badan Usaha Milik Desa. Apabila Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dengan baik terlebih mampu bersumbangsih kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) dan akan mengurangi pengangguran maka masyarakat desa akan semakin mandiri dan sejahtera (Budiono, 2015).

Dewasa ini kita memasuki masa dimana informasi tersebar begitu cepat, teknologi begitu berkembang pesat dan sudah berada pada era 4G dan beberapa negara seperti Arab Saudi, USA, Korea dan Jepang akan bersiap untuk memberlakukan 5G di negara mereka. Hal ini bisa menjadi pisau bermata dua. Disatu sisi hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menyebarkan berita palsu, mengadu domba, isu sara, menyerang nama baik yang menimbulkan polemik dan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, hal ini bisa berdampak positif seperti halnya saat ini dimana kita dihadapkan pada sebuah ujian negara Indonesia dilanda wabah pandemi covid-19 yang mengakibatkan segala aktivitas dibatasi, diberlakukannya work from home, pendapatan berkurang drastis, banyak pekerja yang dirumahkan, dan tak jarang banyak usaha yang gulung tikar.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah bergerak maju untuk merespon hal ini terlihat pemerintah menargetkan akan mendigitalisasi 10.629 BUMDes. Salah satu unit usaha desa yang telah berhasil menerapkan digitalisasi dengan baik adalah Badan Usaha Milik Desa Buluh Duri Mandiri yang terletak di Serdang Bedagai tempat di mana penulis akan melakukan magang. Berdasarkan berita yang dimuat dalam web arumalaka.com disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Buluh Duri Mandiri adalah salah satu nominator dari lima belas BUMDes yang akan menjadi BUMDes digital nasional, ditambah Buluh Duri Mandiri adalah satu satunya BUMDes yang mewakili Sumatera Utara yang akan melakukan *teleconference* dengan presiden Indonesia Ir. Joko Widodo. Badan Usaha Milik Desa Buluh Duri Mandiri telah berhasil memanfaatkan *digital marketing* melalui *google* bisnis, memaksimalkan media sosial seperti, *fanspage*, *instagram*, *channel youtube*. Budiman Purba selaku ketua BUMDes Buluh Duri Mandiri menuturkan bahwa pemanfaatan sistem digital adalah terobosan baru desa-desa di Indonesia untuk kemudahan akses informasi, perluasan pasar, dan produktivitas desa.

Berbeda dengan keadaan yang terjadi pada BUMDes Buluh Duri Mandiri banyak ditemukan bahwa BUMDes lain yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kesulitan dalam memasarkan produk/jasa yang mereka kelola

dikarenakan kemampuan sumber daya manusia yang masih minim sehingga berdampak pada ketidakmampuan mengoperasikan perangkat yang digunakan. Selain minim kemampuan di BUMDes masih terkendala jaringan yang menjadi alat pendukung dalam menerapkan digitalisasi yang berdampak pada keterlambatan memperoleh informasi, melihat pangsa pasar dan tidak maksimal dalam hal pemasaran. Dana yang dimiliki juga terbatas sehingga dalam pemenuhan kebutuhan tidak dapat berjalan dengan maksimal

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi digitalisasi badan usaha milik desa di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Studi Kasus BUMDes Buluh Duri Mandiri. Pemasaran adalah salah satu contohnya. BUMDes yang tersebar begitu banyak namun hanya beberapa yang mampu menyelenggarakan unit usahanya dengan baik, hanya sebagian kecil yang memberikan kontribusi kepada PADes.

Inovasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan unit usaha sehingga selalu ada ide baru yang mampu dijalankan untuk mengasi permasalahan yang terjadi. Seperti halnya saat ini dimasa pandem covid-19 dimana hampir seluruh aktivitas itu berada dirumah, baik usaha, berdagang, kantor dan lain-lain. BUMDes di Kabupaten Serdang Bedagai hanya Sebagian kecil yang menerapkan inovasi, dalam hal pemasaran misalnya sedikit sekali yang sudah mengadopsi teknologi dalam unit usahanya salah satunya adalah BUMDes Buluh Duri Mandiri. Kalau kita cermati ini merupakan salah satu alternatif untuk memasarkan produk atau unit usaha yang dijalankan sehingga tetap berkontribusi dalam.

Tata kelola yang baik merupakan faktor dasar penyokong Maju dan berkembangnya sebuah badan usaha. Sebagaimana Banyak dari BUMDes yang setelah pemebentukan berjalan monoton tidak melakukan pengembangan belum lagi persoalan administrasi keuangan yang memicu kekacauan pada Badan Usaha Milik Desa

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini memperhatikan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah terlaksana baik dalam konteks peningkatan PADes melalui BUMDes maupun berkaitan Digitalisasi di BUMDes. Penelitian Zulkarnain Ridwan yang berjudul Urgensi Badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangunan perekonomian desa (Zulkarnain, 2014) menemukan bahwa kegiatan bumdes yang profesioanal dan ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Penelitian Rahma Yuliani dkk mengenai Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDES Kayu Bawang menyimpulkan bahwa Digitalisasi pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyajian informasi keuangan. Penelitian Fandrik Haris Setia Putra menemukan bahwa BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (social

institution) dan lembaga komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berpijak pada kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga komersial, BUM Desa bertujuan memberikan pelayanan berupa barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat (Putra, 2019). Penelitian Irfan Nursetiawan menemukan bahwa QR Code dan Facebook Marketplace merupakan digital platform yang dapat digunakan oleh khalayak ramai, khususnya masyarakat desa, tetapi perlu dimodifikasi dan dioptimalisasi yang mendukung pemasaran produk unggulan desa 2019 (Irfan Nursetiawan, 2019). Penelitian Mansur, dkk. Pemanfaatan Potensi Lokal Melalui Digital Dan Interpretasi 4.0 Produk Bumdes Didesa Kertagena Tengah Kec. Kadur Kab. Pamekasan menemukan bahwa. untuk meningkatkan moto hasil perlu adanya peningkatan pemasaran dengan memanfaatkan digitalisasi yang transs saat ini di berbagai sosial media (Mansur, 2019)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis mengambil pembahasan dalam segmentasi yang berbeda dari penelitian yang terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi digitalisasi Badan Usaha Milik Desa, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni mengungkap pendapat Edward III (Edward III, 199) yang menyatakan bahwa baiknya implementasi dinilai dari 4 indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi

1.5. Tujuan

Penelitian ini dilaksanakan untuk menggambarkan Implementasi Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera utara dengan studi kasus BUMDes Buluh Duri Mandiri.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif metode deskriptif dan pendekatan induktif dan menganalisis keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi yakni menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai, Camat Kecamatan Sipispis, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Sipispis, Kepala Desa Buluh Duri, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buluh Duri, Direktur Badan Usaha Milik Desa Buluh Duri adapun dari masyarakat sebanyak 3 informan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses digitalisasi yang ada di BUMDes Serdang Bedagai beragam dengan memanfaatkan berbagai *platform digital* yang tersedia. Mulai dari pemanfaatan media sosial seperti *whatsapp*, *instagram*, dan *youtube*. Terdapat juga yang menerapkan *website* untuk membuat sebuah *marketplace* jual beli, kerjasama

dengan pihak ketiga seperti perbankan dalam hal proses pembayaran dan pembelian produk digital seperti pulsa, token PLN, pembayaran BPJS dll.

dapat diukur dari konsep implementasi yang dikemukakan oleh Edwards yang merinci mengenai empat faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu proses implementasi program atau kegiatan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap kecenderungan), dan struktur birokrasi.

Adapun lebih mendetail, Edwards III (1980) menerangkan 4 faktor tersebut sebagai berikut:

3.1. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah langkah awal yang berpengaruh penting terhadap implementasi digitalisasi Badan Usaha Milik Desa. Kebijakan akan terlaksana dengan baik bila terdapat hubungan komunikasi yang harmonis antara pembuat kebijakan dan implementor (pelaksana kebijakan), pelaksana kebijakan dengan mitranya serta sesama pelaksana kebijakan. Komunikasi yang terbangun antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah berjalan dengan sangat baik

3.2. Sumber daya

Setiap kebijakan agar berjalan dengan baik sebagaimana tujuan yang ingin dicapai harus memiliki sumber daya memadai mulai dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya yang lain sehingga kebijakan terlaksana. sumber daya manusia adalah terpenuhinya pelaksana kegiatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. sumber daya finansial adalah terpenuhinya biaya anggaran yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu program. Adapun sumber daya pendukung yang dimaksud bisa berupa sarana dan prasarana. Ketiga hal tersebut harus menjadi perhatian bersama. Bila tidak ada sumber daya manusia yang mencukupi maka akan ditemukan kendala dan implementasi berjalan monoton. Sumber daya finansial menjamin keberlanjutan dari suatu kebijakan, tanpa didukung finansial berupa anggaran yang cukup, program tidak bisa jalan dan akan lambat dalam mencapai tujuan.

3.3. Disposisi

Implementasi digitalisasi Badan Usaha Milik Desa belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana fakta dilapangan jangankan memanfaatkan teknologi para pengurus BUMDes saja masih ada yang belum mengerti proses penyelenggaraan BUMDes dan ada juga yang anti terhadap teknologi. ini menunjukkan bahwa sikap dari implementor belum sejalan dengan yang diharapkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai.

3.4. Struktur birokrasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai secara regulasi telah menyampaikan pada desa agar dalam pembentukan BUMDes bergerak kearah yang maju sehingga tidak hanya membentuk tapi setelah

pembentukan bergerak mengadopsi berbagai macam teknologi yang ada supaya lebih *update* kedepan dan menginstruksikan pada pihak kecamatan untuk lebih peduli dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan BUMDes dan mengajak desa menerapkan digitalisasi. Standard Operasional Prosedur yang merupakan hal yang penting dalam kegiatan mengacu kepada regulasi yang ada dan mendorong pihak kecamatan dan desa menyusun standar operasional prosedur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum menetapkan Standar Operasional Prosedur menyangkut digitalisasi namun menekankan pembuatan SOP disesuaikan dengan digitalisasi yang digunakan kalau bersifat informasi seperti *website* dan media sosial dalam hal ini SOPnya dibuat lebih sederhana namun kalau digitalisasi yang diterapkan terkait kerjasama dengan perbankan dalam hal pembayaran bisa jadi lebih rumit.

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan kepada bidang-bidang demi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi yang panjang akan menyulitkan kendali dan rumit dalam menerapkan prosedur, sehingga implementasi menjadi tidak fleksibel dan berimbas terhadap keberhasilan implementasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai memiliki struktur organisasi yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Terdiri dari 3 bidang yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Kelembagaan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Usaha Perekonomian Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Bidang yang mengurus terkait BUMDes adalah Bidang Usaha Perekonomian Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pada peraturan tersebut dirincikan juga mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu pada pasal 2 huruf d poin 8 yang menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan digitalisasi pada Badan Usaha Milik Desa memberikan pengaruh yang sangat baik dalam pengelolaan unit usaha yang dimilikinya menjadikan BUMDes tersebut dapat berkontribusi lebih dalam sumbangan terhadap PADes. Penulis menemukan temuan penting pada BUMDes yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini dimana penggunaan digitalisasi memberikan inovasi baru didalam pengelolaan unit usaha, menarik pengunjung dan terkhusus memberikan manfaat yang lebih terhadap masyarakat sekitar. Sama halnya dengan penelitian Irfan Nursetiawan yang menemukan bahwa QR Code dan Facebook Marketplace merupakan digital platform yang dapat digunakan oleh khalayak ramai, khususnya masyarakat desa, tetapi perlu dimodifikasi dan dioptimalisasi yang mendukung pemasaran produk unggulan desa (Nursetiawan, Irfan, 2019). QR Code dan Facebook Marketplace merupakan media digitalisasi dalam hal pemasaran.

Serupa dengan program yang lainnya penerapan digitalisasi ini masih memiliki kekurangan diantaranya sumber daya yang belum cakap dalam menggunakan media-media digitalisasi dikarenakan tingkat Pendidikan yang berbeda-beda. Dalam penelitian lain menyimpulkan terbatasnya pengetahuan pengurus dalam memahami

makna kepemimpinan, manajerial dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa disertai kurangnya pengalaman seorang direktur dalam berwirausaha untuk mengelola sebuah lembaga bisnis (Welli Indra Mayu,2016).

Selanjutnya yang menjadikan digitalisasi ini memiliki prospek yang baik adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap implementasinya di setiap Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai mulai dari penunjukan *role model* untuk memahamkan pihak BUMDes mengenai penerapan digitalisasi yang baik, penjajuan secara berkala baik secara langsung maupun dengan memanggil ke kabupaten guna melakukan monitoring. Peran pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat adalah suatu tugas guna mendukung proses pemberdayaan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan dan dicita-citakan. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes, desa tidak dapat berjalan sendiriantanpa adanya bantuan dan dukungan terutama dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat (Ihsan, A.N., 2018)

Adanya digitalisasi ini diharapkan agar BUMDes mampu bergerak maju untuk melakukan inovasi, bertahan setelah pendirian dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Digitalisasi meningkatkan Motivasi masyarakat untuk berwirausaha dan memanfaatkan teknologi informasi (Choirina, H., & Reinold, A., 2021)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Serdang Bedagai, dapat disimpulkan bahwa :

Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa sudah diterapkan hanya saja masih sebatas himbuan atau dorongan dengan pembuatan dan penunjukan *role model* oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga dapat ditiru dan diterapkan di BUMDes lain yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai. salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa Buluh Duri Mandiri yang terletak di Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai yang mampu surplus dimasa pandemi dengan kontribusi ke PADes sebesar 10 juta rupiah

Terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam proses implementasi digitalisasi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Serdang Bedagai:

Pengetahuan pengurus Badan Usaha Milik Desa terkait pemanfaatan teknologi masih terbatas, Latar belakang Pendidikan pengelola berbeda , Masih terdapat titik-titik blank yang dilokasi tersebut tidak terdapat jaringan sehingga untuk pemanfaatan teknologi pada keadaan tertentu belum bisa dilakukan secara maksimal, *Mindset* pengelola bumdes yang belum paham bahwa mendirikan Badan Usaha Milik Desa adalah suatu langkah meningkatkan ekonomi masyarakat, Anggaran terbatas untuk mendorong pengurus Badan Usaha Milik Desa agar lebih paham terkait proses digitalisasi

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai :Membuat *marketplace* yang bernama hopeshop.id

sebagai wadah BUMDes ataupun UMKM yang ingin memasarkan produk yang dimiliki sehingga dapat terjamah oleh masyarakat luas, Melakukan monitoring dan pengecekan berkala terhadap Badan Usaha Milik Desa, Memberikan teguran hingga surat peringatan terhadap BUMDes yang tidak melakukan terobosan., Menjembatani para pegiat-pegiat teknologi dengan para pengurus BUMDes, Menggaet pihak-pihak akademi dalam memecahkan permasalahan yang terdapat di BUMDes Kabupaten Serdang Bedagai.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Badan Usaha Milik Desa saja sebagai model studi kasus

Arah Masa Depan (future work)

Penulis menyadari dan tidak menutup kemungkinan terdapat temuan lain, sehingga penulis menyarankan untuk dilaksanakan penelitian lanjutan di waktu depan pada lokasi yang sama berkaitan dengan implementasi digitalisasi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Serdang Bedagai guna memperoleh hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat-Nya sehingga terselesaikannya penelitian ini. Penulis berterima kasih kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah membantu penelitian ini berjalan baik juga kepada pihak BUMDes Buluh Duri dan jajarannya yang telah memperkenankan penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A.N.Ihsan, and B. Setiyono, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 7, no. 04, pp. 221-230, Sep. 2018.
- Ashfihisa, maghfira baradi, "pengaruh optimaliasasi badan usaha milik desa (BUMDes), pengelolaan aset desa, dan peran kinerja manajerial pemerintah desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PADes)" (Yogyakarta: UMY, 2019), hal.1.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.

- Choirina, H., & Reinold, A. (2021). Digitalisasi Produk Unggulan Desa Sukamaju Pekanbaru berbasis Qr Code dan Facebook Marketplace. *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 25-28
- Irfan Nursetiawan, K. E. (2019). Digitalisasi Produk Unggulan Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Berbasis Qr Code Dan Facebook Marketplace. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 73.
- Mansur, D. (2019). Pemanfaatan Potensi Lokal Melalui Digital Dan Interpreuner 4.0 Produk Bumdes Di Desa Kertagena Tengah Kec. Kadur Kab. Pamekasan. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 166.
- Mayu, W. I. (2016). Faktor-Faktor Yang Menghambat. *Jurnal Fisip*, 10.
- Neneng Asaniyah, Pelestarian Koleksi Langka : Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi, Buletin Perpustakaan No 57, 2017
- Putra, F. H. (2019). Revitalisasi Bumdesa Bersama Dalammenghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Academia Praja*, 6.
- Rahma Yuliani, Rawintan Endas Binti, Sustinah Limarjani, Alfian Misra, Enny Hardy, Nur Astri Sari, Muhammad Yasin. (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan Bumdes Kayu Bawang. *Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul*, 57.
- Zulkarnain, R. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15.